

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini masih dialami oleh berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia. Kemiskinan pun menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. UNDP menjadikan kemiskinan menjadi tujuan pembangunan nomor satu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan). Dari tujuh belas tujuan yang pada SDGs, kemiskinan menjadi fokus utama dalam hal pembangunan global. Jika tujuan mengenai pengentasan kemiskinan muncul dalam tujuan pembangunan global, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi pada negara berkembang, namun juga negara maju secara global dengan kadar dan karakteristik yang berbeda.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan agar semakin berkualitas (Bappenas, 2004). Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dari individu yang tidak memiliki pendapatan dan tingkat konsumsi diatas dari batas minimum. Selain dilihat dari sisi moneter, kemiskinan juga bisa diartikan ketidakmampuan seseorang untuk berfungsi di daerah sekitarnya karena keterbatasan mereka dalam hal pendidikan dan kesehatan (Bank Dunia, 2005). Kemiskinan dapat berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan mata rantai kemiskinan dapat memicu dan menyebabkan timbulnya masalah lain seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan tindak kejahatan.

Secara umum, faktor pendapatan dan distribusi pendapatan dinilai menjadi faktor determinan utama yang menyebabkan kemiskinan. Secara makro, hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi isu sentral yang banyak diteliti dan dikaji oleh para peneliti, termasuk kaitannya dengan kualitas pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan berbagai indikator makro lain yang dikaitkan dengan variabel kemiskinan telah banyak dilakukan penelitian. Kajian kemiskinan, termasuk penyebabnya juga telah banyak dilakukan dalam pendekatan mikro.

Menurut Rini & Sugiharti, (2017), faktor-faktor kemiskinan ialah (1) pengaruh gender kepala keluarga, dimana jika kepala keluarga perempuan memiliki pengaruh yang signifikan; (2) peningkatan satu usia kepala keluarga menurunkan kemungkinan untuk miskin; (3) meningkatnya satu satuan anggota keluarga; (4) kepala keluarga yang tidak bekerja; (5) tidak memiliki akses kredit; (6) kepala rumah tangga dengan pendidikan yang rendah; (7) kepemilikan telepon genggam dan tv kabel; (8) kepemilikan komputer; dan (9) bertempat tinggal di desa. Dalam kajian mutakhir, kemiskinan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan dimensi. Pendekatan Multidimensional dalam memahami kemiskinan saat ini sudah menjadi pendekatan *mainstream* yang dilakukan oleh kalangan lembaga dunia maupun perguruan tinggi.

Kajian dan penelitian terkait dengan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan peneliti dan lembaga seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya tingkat kemiskinan. Termasuk juga dalam aspek pengukuran dan pendekatan yang digunakan dalam membaca realitas kemiskinan yang sangat dinamis. Kompleksitas isu kemiskinan terkait faktor determinan yang tidak tunggal dan multi-dimensional. Tingkat dinamika dipengaruhi konteks perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk gelombang perkembangan Teknologi dan inovasi secara umum. Perkembangan teknologi transportasi sebagai contoh dapat merespon faktor geography yang pada konsep sebelumnya menjadi determinan kemiskinan. Terlebih saat ini, perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi yang secara faktual banyak mempengaruhi konfigurasi potret kemiskinan dan sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

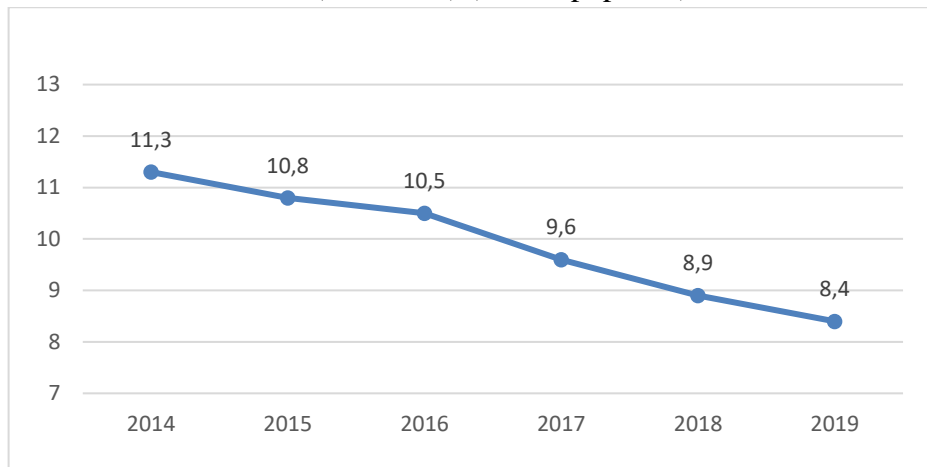
Kedua definisi mengenai kemiskinan menurut Bappenas dan World Bank menggunakan redaksi “individu” untuk menggambarkan suatu kemiskinan. Dalam konteks ini, individu sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Kumpulan individu miskin berada dalam rumah tangga miskin yang kemudian berujung pada terbentuknya masyarakat miskin. Kemiskinan memang menunjukkan kondisi individual dan sebagai individu, orang miskin berupaya untuk keluar dari kondisi kemiskinannya melalui berbagai upaya individual. Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin

tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijanto Soegijoko, 1997). Namun pada prakteknya, isu kemiskinan tentu saja bukan hanya menjadi masalah individual diperlukan peran serta pemerintah— institusi pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh publik untuk mengelola tata kelola publik. Pada akhirnya kemiskinan menjadi masalah publik yang melibatkan insititusi pemerintahan.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa determinan kemiskinan adalah ketiadaan pendapatan yang berdampak pada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mekanisme distribusi pendapatan melalui jalur perekonomian. Upaya pengentasan kemiskinan yang paling ideal melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi agar terjadi mekanisme distribusi pendapatan. Dalam praktiknya, mekanisme pasar dalam perekonomian tidak serta merta menciptakan pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan. Pada akhirnya, Tidak semua permasalahan pada bidang ekonomi dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar (Musgrave, 1989). Dimana yang dimaksud mengenai permasalahan bidang ekonomi, seperti eksternalitas, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dalam konteks inilah, Pemerintah selaku institusi yang bertanggungjawab, diwajibkan untuk melakukan intervensi dalam menangani masalah tersebut (Hatta, 2018).

Berdasarkan data World Bank, persentase kemiskinan di dunia secara agregat mengalami penurunan setiap tahunnya. Data terakhir yang dipaparkan World Bank (pada tahun 2019), diketahui bahwa persentase penduduk miskin di dunia secara agregat berada pada angka 8,4 persen. Gambar 1.1 menunjukkan tren positif dalam hal pengentasan kemiskinan. Namun perlu diingatkan, bahwa tujuan utama dalam SDGs adalah Tanpa Kemiskinan, sehingga diperlukan lagi berbagai upaya dan kebijakan sehingga menjadikan persentase penduduk miskin di dunia dapat menyentuh angka 0 (nol) sesuai dengan tujuan yang ada pada SDGs. Berikut adalah kondisi persentase penduduk miskin di dunia secara agregat.

Gambar 1.1 Rasio Jumlah Penduduk Miskin Global dengan Pendapatan \$2,15 per hari (PPP 2017) (% dari populasi)

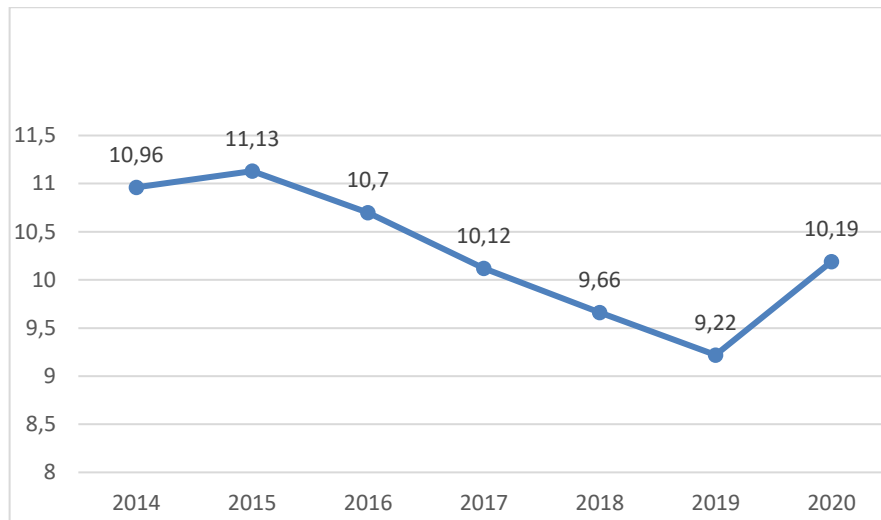


Sumber: World Bank

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tergabung ke dalam 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menjadi negara dengan jumlah penduduk yang banyak dapat memberikan ancaman dan peluang sekaligus. Ancaman dan peluang dari kondisi penduduk tersebut dapat dikelola dan ditentukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menentukan arah suatu negara.

Apabila difokuskan pada Indonesia, kondisi kemiskinan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan Indonesia yaitu 11,13 persen dan terus menurun hingga tahun 2019, yaitu 9,22 persen. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2020, yaitu 10,19 persen. Berikut adalah gambaran kondisi kemiskinan di Indonesia tahun 2014 hingga 2020.

Gambar 1.2
Persentase Penduduk Miskin Indonesia tahun 2014-2020



Sumber: World Bank

Kembali mengutip perkataan Musgrave dalam Adi Widodo (2011), Teori *public finance* mengungkapkan bahwa tidak semua permasalahan ekonomi dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar, tak terkecuali masalah kemiskinan (Hatta, 2018). Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting dan niscaya. Pemerintah dengan berbagai kewenangan, regulasi dan instrumen kebijakan yang dimilikinya menjadi aktor utama dalam upaya pengentasan kemiskinan ini. Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh bank dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin (Kemenkeu, 2022). Strategi dan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan dioperasionalkan dalam berbagai program dan kegiatan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan dengan demikian peran pemerintah—dengan kebijakan dan strategi—menjadi sangat penting. Terkait dengan peran penting pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, menjadi relevan kemudian soal kualitas institusi pemerintah baik dalam aspek kualitas kebijakan, pengelolaan anggaran publik dan atau—karena pemerintah entitas organisasi—aspek kinerja organisasi.

Dalam konsep baru pada tata kelola pemerintahan, dikatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan tidak terbatas pada dimensi ekonomi. Kemiskinan tidak hanya disebabkan dari kurangnya pendapatan, namun juga disebabkan oleh kurangnya pelayanan (baik pada pemanfaatan barang publik, transportasi umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, atau pinjaman) dan kurangnya partisipasi sosial, ekonomi, serta pada keputusan politik, baik lokal, daerah, ataupun nasional. Lebih dari itu, masyarakat miskin sering kali merasa bahwa mereka tidak diikutsertakan, dan tidak mendapatkan pertolongan ketika hak mereka dilanggar dan dieksploitasi oleh orang yang berkuasa (Sumarto et al., 2004).

Menurut Sumarto et al (2004) dalam *SMERU Working Papers*, dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan menjadi salah satu syarat dalam pengentasan kemiskinan, hal tersebut dikarenakan 2 hal, yaitu:

- 1) Tanpa tata kelola pemerintah yang baik, sumber daya yang tersedia tidak dapat memberikan dampak dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya transparansi, adanya korupsi, dan hukum yang bias serta berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat memberikan dampak dalam hal pengentasan kemiskinan
- 2) Tata kelola pemerintah yang baik diperlukan jika ingin mengentaskan kemiskinan melalui semua aspek, tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tapi juga pada pemberdayaan dan peningkatan dalam hal ekonomi, politik, dan sosial untuk masyarakat miskin.

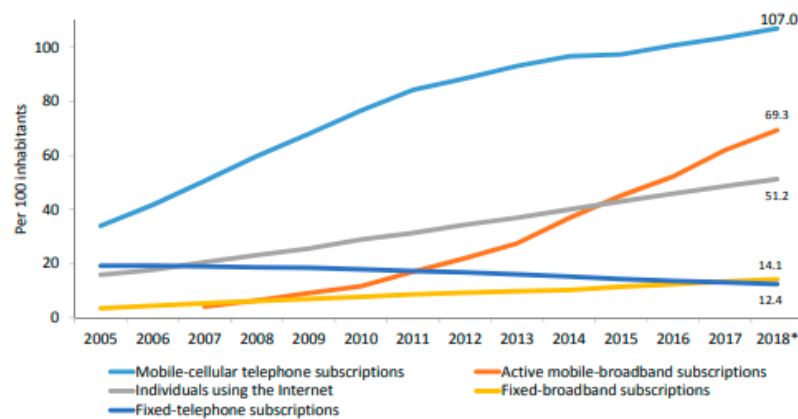
Institusi pemerintah yang kuat memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan juga dibuktikan dalam *Asian Development Bank Working Papers* (2002). Dijelaskan bahwa faktor institusi pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, kebijakan, dan penyediaan layanan sosial (Deolalikar, et al., 2002). Peran serta institusi pemerintah dikatakan sangat menentukan kondisi kemiskinan, terutama dalam hal pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan sosial kepada masyarakat. Karena berdasarkan literatur diatas, kebijakan pemerintah dan penyediaan layanan sosial menjadi sorotan dalam hal pengentasan kemiskinan. Selain itu, kemiskinan bukan hanya perihal kurangnya pendapatan dan

kondisi yang dipandang sebatas sebagai permasalahan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai masalah multidimensi, sehingga diperlukan penyelesaian permasalahan dari berbagai aspek (politik, sosial, dan hukum).

Dalam mengukur kualitas institusi pemerintah, terdapat banyak indikator yang digunakan. Metode yang digunakan di seluruh dunia adalah *World Governance Indicators* (WGI) yang dipublikasikan oleh *World Bank*. WGI merupakan indikator yang mengukur kualitas tata kelola lebih dari 200 negara di dunia. Dalam konteks Indonesia, pengukuran kualitas institusi daerah dilakukan melalui Indeks *Good Governance* yang dirilis oleh BPS namun sifatnya sampling dan tidak periodik. Terdapat juga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas institusi pemerintah, yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dirilis oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Pengukuran IKK ini pun bersifat sampling serta tidak periodik. Mengingat institusi pemerintah provinsi merupakan institusi/organisasi yang mengelola keuangan publik serta memiliki target dan kinerja yang telah ditentukan, maka untuk tingkat daerah (provinsi), kualitas institusi pemerintah dapat diukur dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah untuk akuntabilitas keuangan publik dapat diwakili oleh predikat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk kinerja institusi pemerintah menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dunia saat ini telah mengalami akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut berdampak pada perubahan besar pada setiap aspek kehidupan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh *The International Telecommunication Union* (ITU), didapatkan hasil pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.3
Perkembangan ICT Global



Sumber: The International Telecommunication Union (ITU)

Berdasarkan gambar 1.3, terjadi peningkatan yang signifikan pada pengguna telepon genggam dan pengguna internet. Berbanding terbalik dengan pengguna telepon tetap yang mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi mulai berperan dalam kehidupan sehari-hari manusia.

World Bank (2012) dalam *ICT for greater development impact* telah menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki prospek besar untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut didasari dengan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara faktual mengalami lonjakan yang relatif pesat baik di tingkat global maupun Indonesia.

Dalam konteks sejarah evolusi teknologi yang lebih luas ditemukan pola yang khas bahwa setiap penemuan teknologi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada perubahan pola dan efisiensi pada sisi konsumsi, produksi dan distribusi. Sebagai contoh, sejak penemuan teknologi mesin pada abad ke-18 yang memicu munculnya revolusi Industri di Inggris dan Prancis. Dengan logika serupa, kondisi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam satu dasawarsa terakhir akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian baik level makro maupun mikro.

Beberapa penelitian nampaknya telah mengonfirmasi dugaan ini. Pada level mikro, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini dapat meningkatkan kemampuan pekerja dan faktor produksi lainnya, mengurangi biaya transaksi, dan biaya produksi pada perusahaan (Meijers, 2014; Mofleh et al., 2008), membuat aktifitas bisnis, marketing, dan penetapan harga menjadi lebih efisien, membuat perusahaan dapat menghubungi secara langsung pelanggannya dan proses kontrak yang lebih cepat (Choi, 2003; Bianchi and Mathews, 2016). Sedangkan pada level makro, Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Czernich et al, 2011; Pradhan et al, 2014) Sprassert (2010), Osogwa, Kelechi dan Romanus (2013), (Hodrab et al., 2016), meningkatkan investasi asing langsung (Choi, 2003), menstimulasi volume perdagangan internasional (Frehund dan Weinhold, 2004) serta mengurangi pengangguran (Czernich, 2014), menurunkan tingkat inflasi (Yi and Choi, 2005), mencegah terjadinya korupsi (Lio et al, 2011; Goel et al, 2012), dan dapat mengurangi kegiatan “ekonomi bawah tanah” (Elgin, 2013).

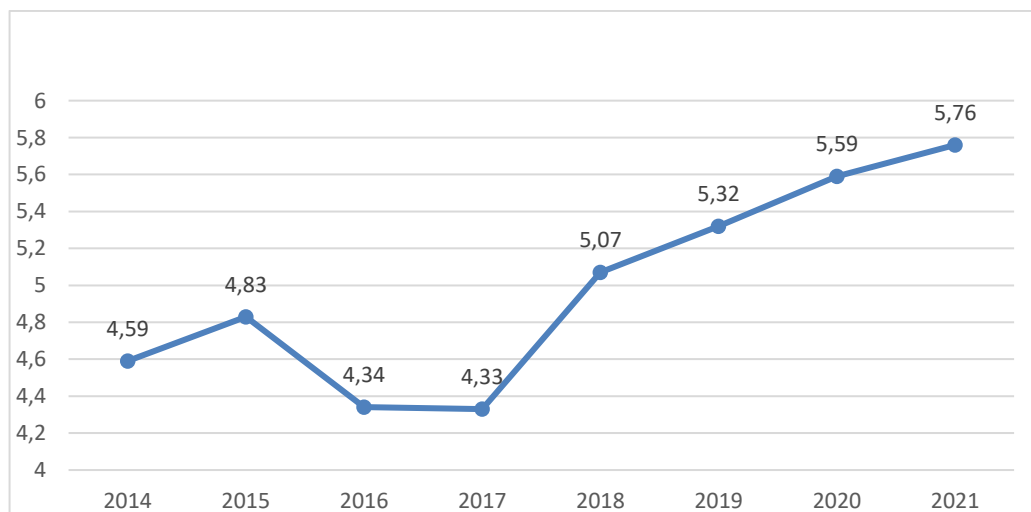
Namun demikian, (Barry, 2018) dalam hasil penelitiannya (hal-35) berpandangan bahwa penelitian terkait hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan ekonomi, welfare dan pembangunan ekonomi dinilai masih terlalu umum (*Big Capture*) belum banyak penelitian yang menjelaskan hubungan antara perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kemiskinan—sebagai isu yang lebih spesifik dari pembangunan ekonomi—yang cukup menyakinkan.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat secara global terjadi juga di Indonesia. Dibuktikan dengan data Perkembangan Akses Rumah Tangga Indonesia terhadap TIK yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Berdasarkan data yang disajikan, secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (IP-TIK) Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada angka 5,07 dengan skala 0-10. Sedangkan pada tahun 2017 berada di angka 4,96. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2017 tingkat pengguna internet di Indonesia sebanyak 32,34 persen dari seluruh penduduk Indonesia dan meningkat menjadi

39,90 persen pada tahun 2018. Tren peningkatan pengguna internet di Indonesia terus berlanjut hingga saat ini (tahun 2022). Diketahui pasca pandemi tercatat 77,02 persen dari seluruh penduduk di Indonesia sudah menggunakan internet. Berdasarkan BPS, nilai IP-TIK dikategorikan sebagai tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Dan pada tahun 2017—2018, seluruh provinsi berada dalam kategori sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada provinsi yang tertinggal dalam kategori sangat rendah dan juga tidak ada provinsi yang masuk dalam kategori tinggi di tahun 2017-2018.

Gambar 1.4

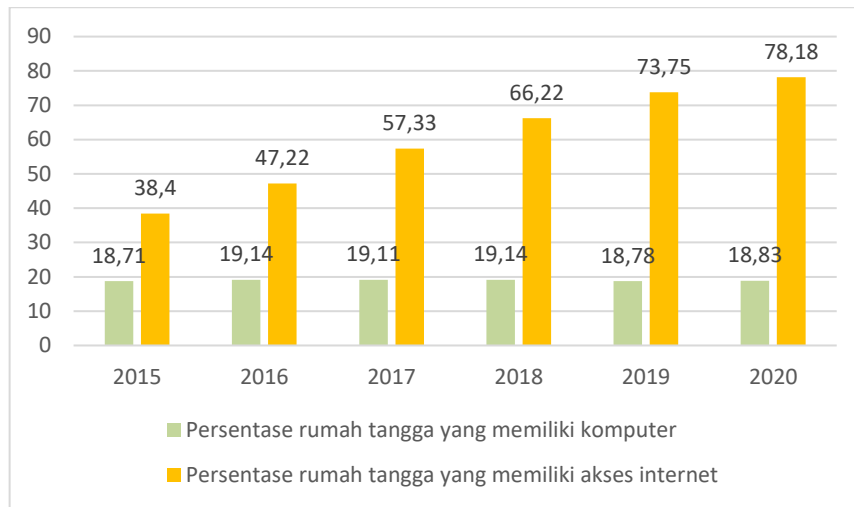
Perkembangan Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) di Indonesia tahun 2014-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Masih berdasarkan BPS, pada gambar 1.5 digambarkan kondisi perkembangan akses rumah tangga di Indonesia terhadap TIK. Diketahui sebanyak 66,22 persen rumah tangga telah memiliki akses terhadap internet di tahun 2018. Nilai ini meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2015 yang hanya 38,40 persen.

Gambar 1.5
Perkembangan Akses Rumah Tangga Indonesia Terhadap TIK Tahun 2015-2020

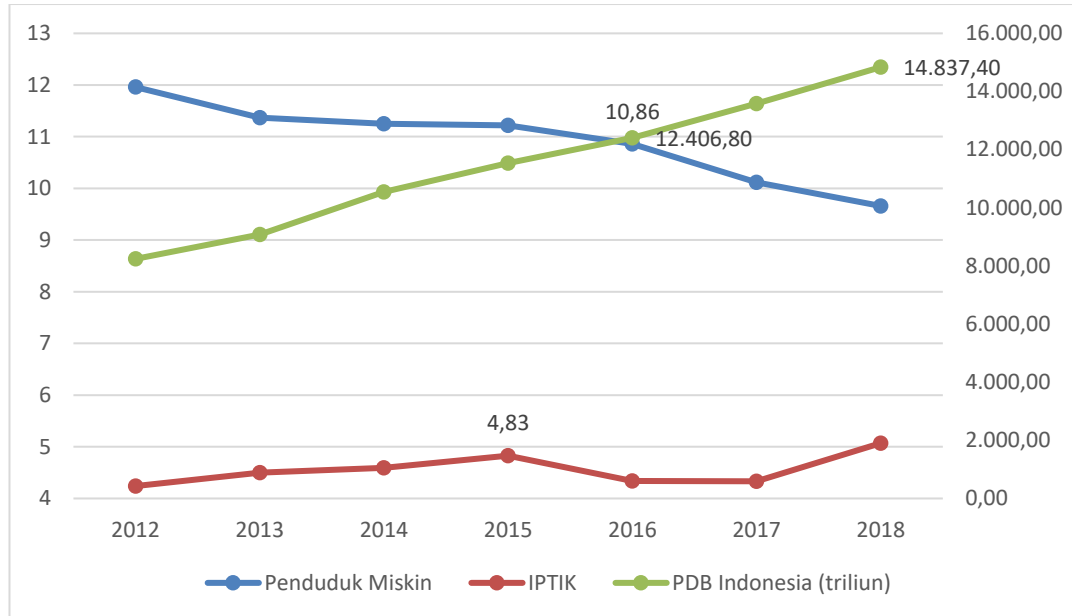


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dengan melihat berbagai data perkembangan Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mutakhir sebagai gambaran besar serta data hasil survei dan berbagai penelitian yang tersedia makin menambah bobot relevansi penelitian yang mendalam dan *up to date*—membuka *black box* menurut Barry--tentang hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan fenomena kemiskinan di Indonesia.

Sejak tahun 2011, Bappenas bersama UNDP telah menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bagian dari strategi dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun tawaran tersebut lebih pada pendekatan proyek dan belum ada evaluasi komprehensif terkait dengan ini, namun menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan didasarkan pada argumen empirik keberhasilan Teknologi Informasi dan Komunikasi digunakan dalam berbagai proyek pengentasan kemiskinan di beberapa negara. Dalam konteks Indonesia, meski tingkat kemiskinan mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir berdasarkan data dari BPS, namun isu kemiskinan masih menjadi bagian dari agenda yang perlu mendapatkan perhatian serius sekaligus tantangan utama dalam pembangunan ekonomi. Di tingkat global, kemiskinan masih menjadi prioritas berbagai lembaga dunia termasuk dalam agenda SDGs.

Gambar 1.6 Persentase Penduduk Miskin, IP-TIK, dan PDB Indonesia tahun 2012-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.6 memberikan gambaran kondisi Penduduk Miskin, IP-TIK, dan PDB Indonesia. Digambarkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada PDB Indonesia 2012 hingga 2018. Berbanding terbalik dengan kondisi PDB, kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama 7 tahun terakhir. Selain itu, kondisi IP-TIK menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Kondisi dan perkembangan tersebut tentu saja sangat berdampak pada pelbagai aspek kehidupan masyarakat, baik pada ranah sosial budaya maupun perilaku ekonomi yang lebih spesifik, terkait dengan perilaku konsumsi dan produksi.

Tentu saja dalam konteks ekonomi, perkembangan pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi relatif sangat berpengaruh terhadap efisiensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi serta perubahan pada turunan dari sector pembangunan ekonomi lainnya (Mefteh & Benhassen, 2015), (Vecchi & O'Mahony, 2003), dan (Meijers, 2014). Hal ini semakin memperlihatkan betapa penting dan strategisnya peran sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi

tersebut dalam meningkatkan kualitas pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga tidaklah heran jika hampir seluruh negara selalu meletakkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu pilar pembangunan yang penting untuk diperhatikan kinerjanya (ITU-UNESCO, 2016).

Pada sektor pemerintah, perkembangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang berkembang di masyarakat berdampak pada menguatnya dorongan gagasan dan praktik model Pemerintahan Digital, *E- Govt*, *Mobile Government* atau apapun Istilahnya. Pemerintah harus responsive dan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan teknologi yang berkembang, terutama dalam bidang ICT. Menurut Grönlund & Horan (2005) istilah *e-Government (e-Gov)* digunakan pada akhir tahun 1990-an, namun sejarah penggunaan teknologi Komputer dalam organisasi pemerintah dapat ditelusuri sejak ditemukannya teknologi Komputer paling tidak pada tahun 1970-an (Kraemer, et al, 1978, Danziger and Anderson, 2002). Berdasarkan data dari UN-DESA (*Departement of Economic and Social Affair*), lembaga yang melakukan *assessment* dan monitoring dalam pelaksanaan e-Gov di 193 negara di dunia juga sekaligus melakukan pemeringkatan dalam Indeks Pengembangan E-Government atau E-Government Development Index (EDGI) menyampaikan bahwa pada umumnya negara berkembang mulai menjajaki sekaligus mengadaptasi model dan konsep E-Government pada tahun 2000-an, termasuk Indonesia.

Terkait dengan Istilah dan Konsep *E-Government* sendiri, banyak pendapat dari berbagai ahli dan badan yang otoritatif terkait dengan ini. Konsep E-government juga dikenal dengan istilah lain yaitu *e-gov*, *electronic government*, *Internet governance*, *digital government*, *online government*, *connected government*. Pada tahun 2014 beberapa negara OECD masih menggunakan Istilah *Digital Government*. Sedangkan menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, *e-Government* adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga- lembaga lainnya secara online. Terkait dengan model penerapan dan pengembangan, Siau & Long (2005) memaparkan beberapa model

tahapan perkembangan e-government yang diusulkan oleh beberapa peneliti. Gartner (2000) mengajukan model 4 tahapan yaitu: *web presence, interaction, transaction, dan transformation*. Deloitte (2001) mengajukan model 6 tahapan yaitu: *information publishing, official two way transaction, multi-purpose portals, portal personalization, clustering of common services, dan full integration and enterprise transaction*. Berdasarkan konteks pengalaman di United States, Layne & Lee (2001) mengajukan model 4 tahapan perkembangan e-government yaitu : *cataloguing, transaction, vertical integration, dan horizontal integration*. Model-model lain seperti yang diajukan oleh United Nation (2001), Hiller and Belanger (2001), Moon (2002) juga dipaparkan dalam Siau & Long (2005).

Dalam Konteks Indonesia, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjadi momentum dan bentuk manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi (TI). Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, pemerintah menginstruksikan kepada beberapa pejabat lembaga pemerintahan termasuk gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah demi terlaksananya *e-government* secara nasional, merumuskan dan melaksanakan rencana tindak lanjut dan berkordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan melaksanakan instruksi dengan sebaik-baiknya (Instruksi Presiden, 2003). Menyusul Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan beberapa dokumen terkait pelaksanaan *e-government* antara lain: (1) Dokumen berisi cetak biru (*blueprint*) sistem aplikasi *e-government* bagi pemerintah daerah; (2) Panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-government* di Indonesia.

Terkait dengan penerapan model dan tahapan di Indonesia, Instruksi Presiden memaparkan 4 model tahapan pelaksanaan *e-government*. Dijelaskan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 bahwa pengembangan *e-government* dilakukan melalui 4 tingkatan : (1) persiapan, (2) pematangan, (3) pematapan, dan (4) pemanfaatan. Kondisi *e-government* pada saat Instruksi Presiden dikeluarkan tahun 2003 adalah bahwa *e-government* di Indonesia sebagian besar masih dalam

tahapan pertama (persiapan), hanya sebagian kecil yang sudah mencapai tingkat kedua (pematangan), dan belum ada satu pun yang mencapai tingkat ketiga (pemantapan) dan/atau tingkat keempat (pemanfaatan). Uraian penjelasan mengenai 4 tingkatan tersebut 1) Persiapan, meliputi: pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, sosialisasi situs informasi internal dan publik. 2) Pematangan, meliputi: pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. 3) Pemantapan, meliputi: pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain 4) Pemanfaatan, meliputi: pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

Evaluasi implementasi *e-government* di Indonesia dilakukan secara berkala oleh Direktorat *e-Government* Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI). Evaluasi PeGI tingkat provinsi tidak diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi. Pada 2011 diikuti oleh 26 provinsi (Hernikawati, 2013), diikuti oleh 24 provinsi pada 2012, diikuti oleh 21 provinsi pada 2013, diikuti oleh 22 provinsi pada 2014, dan 20 provinsi pada 2015 (Kemkominfo). Hasil rata-rata evaluasi juga menunjukkan pola yang fluktuatif. *E-government* dinilai ‘kurang’ pada 2012, ‘baik’ pada 2013, ‘kurang’ pada 2014, dan ‘baik’ pada 2015.

Melihat kedua fenomena faktual ini yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat, massif dan akseleratif serta dampaknya terhadap perekonomian, serta fakta meningkatnya komitmen pemerintah dalam menerapkan model *e-government* dalam tata kelola pemerintahan, nampaknya menjadi sangat menarik untuk melihat hubungan keduanya dengan tujuan dari tata kelola pemerintahan (*governance*) itu sendiri yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera (*public welfare*) baik dalam ukuran meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat maupun dengan ukuran menurunnya kemiskinan di sebuah wilayah.

Kajian dan penelitian terkait dengan dampak perkembangan TIK terhadap kesejahteraan (*welfare*), produktifitas relatif sudah banyak diteliti oleh para

peneliti. Penelitian James (2014) melakukan riset tentang *Internet Use and Welfare Evidence Africa, ICT and Productivity* (Cardona et al., 2013), *ICT's Impact on Productivity, Welfare and Social Change* (Tisdell, 2014), Penelitian oleh Bongo (2005), Sprassert (2010), Osogwa, Kelechi dan Romanus (2013), Hodrab et al.(2016) menunjukkan dampak TIK terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun demikian, penelitian dan riset yang secara langsung mendalami hubungan langsung antara pengaruh TIK dengan pengentasan kemiskinan relatif masih kurang. Penelitian Jack Barry (2018) dalam penelitian disertasinya yang kemudian menjadi buku yang baru terbit tahun 2018, yang berjudul *ICT and Poverty Alleviation*, menunjukkan bahwa masih ada ruang yang belum terang menderang terkait hubungan TIK dengan Pengentasan Kemiskinan secara langsung, berbasis kuantitatif.

Terkait dengan dampak TIK terhadap Kemiskinan, menurut Barry (2018), ada dua pandangan yang berbeda diantara para ahli (*scholars*) yaitu ada yang berpandangan optimistik bahwa TIK akan berdampak pada pengurangan kemiskinan, dan ada yang *skeptical* dalam melihat hubungan keduanya. Pandangan Optimistik menilai bahwa TIK akan membawa cahaya "*light*" bagi pembangunan ekonomi dan membuka kotak hitam "*black box*" pemerintahan yang koruptif. (Dyson 1997, Friedman 2006, Schimdt dan Cohen 2013). Sedangkan kelompok *skeptical* berpandangan pemanfaatan TIK akan optimal membutuhkan beberapa prasyarat substansial yaitu investasi waktu, kondisi sumber daya, tingkat pendidikan dan modal manusia. Kelompok skeptic berpandangan, bahwa perkembangan TIK tidak serta merta dapat berdampak positif pada pembangunan dalam kondisi prasyarat belum terpenuhi. Penelitian terkait dengan hubungan perkembangan TIK terhadap kemiskinan di negara yang sedang berkembang relatif masih belum banyak dilakukan atau bahkan kurang mendapat hasil penelitian yang memuaskan. Forester, Grace, Kenny (2002) menunjukkan bahwa banyak penelitian kuantitatif dan sedikitnya studi kasus, menghasilkan kesimpulan yang berbeda dalam melihat apakah TIK dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin?

Dalam konteks Indonesia, tentu saja isu dan tema ini menjadi sangat menarik mengingat secara faktual jumlah pengguna Internet pada tahun 2019 sudah mencapai 73 persen dari jumlah penduduk, artinya penetrasi internet mencapai 73 persen dan satu sisi Implementasi *E- Government* pada tahun 2019 ini sudah mencapai tahapan 3 dan 4, bahkan beberapa kota dan provinsi sudah fokus pada penguatan tahapan 4. Sementara satu sisi, tingkat kesejahteraan yang dalam penelitian ini diwakili oleh tingkat kemiskinan yang masih cukup besar meskipun mengalami tren penurunan di tahun 2019 dengan angka 9,22% atau setara dengan 24,97 juta jiwa penduduk. Penelitian ini ditujukan untuk mendalami sekaligus mengkonfirmasi hubungan antara perkembangan TIK, terutama tingkat penetrasi Internet, Implementasi *E-Government*, kualitas institusi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan unit analisis 34 propinsi selama 7 tahun dari tahun 2014--2020

1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan TIK di Indonesia semakin akseleratif dan masif. Hal tersebut jelas terbukti pada Gambar 1.4 yang memberikan gambaran perkembangan TIK di Indonesia. Berkembangnya TIK berdasarkan literatur yang ada, dinilai mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah Kemiskinan. Terkait hubungan antara TIK dan Kemiskinan, menurut pandangan optimistik, perkembangan TIK akan berdampak pada kemiskinan. Meskipun, hubungan antara keduanya masih dinilai belum terlalu jelas “terang menderang” dan masih bersifat *Big Capture*. Menurut Barry, hubungan antara TIK dan kemiskinan akan terjawab dengan melibatkan atau memperhitungkan peran institusi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (ICT and Poverty ; Enter Government). Oleh karena itu, studi empiris hubungan antara dampak TIK terhadap kualitas institusi pemerintah dan kemiskinan untuk kasus Indonesia menjadi relevan guna memperkuat pandangan mazhab optimistik.

Implementasi TIK oleh pemerintah atau *e-government* secara faktual, telah diimplementasikan sejak tahun 2003 dan mengalami transformasi kebijakan dan bentuk program hingga tahun 2018 dalam bentuk Sistem Pemerintah Berbasis

Elektronik (SPBE). Secara teoritik, implementasi *e-government* atau SPBE dapat meningkatkan kualitas institusi pemerintah, baik kebijakan, layanan publik, maupun program pemerintah. Namun, studi empiris terkait dengan pengaruh implementasi *e-government* terhadap kualitas institusi pemerintah masih perlu dibuktikan. Penelitian pun menjadi bagian upaya konfirmasi atas pengaruh TIK terhadap kualitas institusi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan terkait dengan hubungan antara perkembangan TIK, Kualitas Institusi Pemerintah dan Kemiskinan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melihat, mendalami dan menganalisis hubungan antara TIK, Implementasi *E-Government*, Kualitas Institusi Pemerintah dan Kemiskinan yang ada di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh TIK dan *E-Government* terhadap Kualitas Institusi Pemerintah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Institusi Pemerintah terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh TIK dan *E-Government* terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh TIK dan *E-Government* terhadap Kualitas Institusi
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Kualitas Institusi terhadap tingkat Kemiskinan.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh TIK dan *E-Government* terhadap tingkat Kemiskinan.